801-
20/3-25

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN KEDIRI**

Ayu Nisa'Usholihah, Sri Suwitri

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Child marriage cases in Kediri Regency show quite high numbers, even reaching 429 cases in 2023. Therefore, the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Service (DP2KBP3A) of Kediri Regency has a role in preventing child marriage in Kediri Regency. The purpose of this study is to describe and analyze the role of DP2KBP3A in preventing child marriage in Kediri Regency and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors of DP2KBP3A's role in preventing child marriage in Kediri Regency. This study uses a qualitative method with descriptive analysis and is accompanied by relevant supporting evidence. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation studies. The research was conducted at DP2KBP3A Kediri Regency. The results of this study indicate that DP2KBP3A Kediri Regency has implemented various strategies in preventing child marriage, including optimizing child resources, creating a supportive environment, accessibility and expansion of services, strengthening regulations and institutions, and strengthening stakeholder coordination. Supporting factors in the role of DP2KBP3A are the implementation of various socialization, education, and counseling activities supported by cross-sectoral stakeholder cooperation. Inhibiting factors in the role of DP2KBP3A include limited budget, less than optimal management of social media and pages, the absence of special training for stakeholders involved, and the quantity of Human Resources (HR) which is still lacking.

Keywords: *Role of Government, Prevention, Child Marriage*

ABSTRAK

Kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri menunjukkan angka yang cukup tinggi, bahkan mencapai angka 429 kasus pada tahun 2023. Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri memiliki peran dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran DP2KBP3A dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri serta menjabarkan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran DP2KBP3A dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan disertai bukti-bukti pendukung yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai strategi dalam pencegahan perkawinan anak, meliputi optimalisasi sumber daya anak, penciptaan lingkungan yang mendukung, aksesibilitas dan perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Faktor pendukung dalam peran DP2KBP3A adalah pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan konseling yang didukung dengan kerja sama antar-*stakeholders* lintas sektor. Faktor penghambat peran DP2KBP3A meliputi terbatasnya anggaran, pengelolaan media sosial dan laman yang kurang maksimal, belum adanya pelatihan khusus bagi *stakeholders* yang terlibat, serta kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pencegahan, Perkawinan Anak

PENDAHULUAN

Peran pemerintah sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran tersebut dapat terbagi menjadi empat peran utama, yaitu: (1) peran fasilitatif; (2) peran edukasional; (3) peran representatif; serta (4) peran teknis.

Pemerintah bertanggung jawab dalam pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh warganya tanpa diskriminasi. Termasuk di dalamnya yaitu layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan infrastruktur. Pemerintah juga memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan manusia yang

berkualitas. Pemberian layanan dasar dan perlindungan sosial menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sudah sepatutnya kehidupan anak-anak Indonesia mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan sumber hukum

tersebut, maka sudah seharusnya hak-hak anak diberikan secara penuh oleh pemerintah, tanpa terkecuali. Akan tetapi, dalam dinamika kehidupan sosial sekarang ini, hak-hak tersebut banyak dirampas oleh permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Usia anak yang seyogianya dimanfaatkan untuk mengembangkan dan mengeksplorasi diri justru dihabiskan untuk hal-hal yang bukan sewajarnya dilakukan di usia tersebut. Salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan hal ini yaitu perkawinan anak.

Tingginya kasus perkawinan anak di Indonesia menjadi masalah sosial yang kompleks. Maraknya fenomena ini dapat berasal dari persoalan struktural yang seolah telah mendarah daging. Perkawinan anak dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih dominan dibandingkan dampak positif yang dibawanya dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak agar fenomena ini tidak semakin membawa dampak buruk bagi masa depan Indonesia.

Fenomena perkawinan anak di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF, pada tahun 2023 Indonesia menempati peringkat keempat di dunia atas kasus perkawinan anak, dengan sekitar 25,53 juta anak perempuan yang dinikahkan. Angka ini sekaligus

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus perkawinan anak terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang menghadapi permasalahan perkawinan anak. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020 yang diperoleh dari *Katadata.id*, Jawa Timur berada di posisi ketiga dengan persentase sebesar 10,85% perkawinan perempuan di rentang usia 7-15 tahun. Dalam rentang tahun 2018-2022, angka perkawinan anak di Jawa Timur masih berada di rentang 18-21%. Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki angka perkawinan anak cukup tinggi yaitu Kabupaten Kediri. Puluhan bahkan hingga ratusan pasangan berbondong-bondong mengajukan dispensasi kawin (diska) kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Penanganan perkawinan anak di Jawa Timur maupun di Kabupaten Kediri sejatinya telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Pada tahun 2021, Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Terus menunjukkan komitmen yang serius, dikeluarkan pula Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Tahun 2023-

2024. Dalam regulasi ini, didefinisikan bahwa pencegahan perkawinan anak adalah upaya untuk mencegah perkawinan anak. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, meliputi: (a) optimalisasi kapasitas sumber daya anak; (b) lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; (c) aksesibilitas dan perluasan layanan; (d) penguatan regulasi dan kelembagaan; serta (e) penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Strategi ini sebenarnya merupakan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang kemudian diadopsi di berbagai daerah. Dinas utama yang dituju dalam peraturan ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengambil langkah lebih lanjut dalam pencegahan perkawinan anak. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), pemerintah melakukan upaya-upaya antisipasi.

DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah melaksanakan peran edukasional. Berbagai strategi kampanye dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Akan tetapi, edukasi dilakukan kurang secara masif. Konten edukasi yang dibuat

oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri di media sosial masih mendapatkan *engagement* yang rendah. Akhirnya, penyebaran informasi tidak dapat menjangkau masyarakat secara luas. Pesan edukasi yang ingin diberikan pun tidak bisa tersampaikan dengan baik.

Peran fasilitatif dan teknis DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga telah ditunjukkan. Pada tahun 2022, DP2KBP3A menggalang program bertajuk Cafe Sahabat Anak dan Keluarga (Sanak). Pada tahun 2024, dari sebanyak 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, program Cafe Sanak baru dirilis di 7 wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum menunjukkan capaian yang baik. Belum meluasnya pelaksanaan program menjadikan masih banyak masyarakat Kabupaten Kediri yang belum merasakan dampak dari adanya program Cafe Sanak.

DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga turut mengajak elemen masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak. Pada akhir 2023, DP2KBP3A Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan pengukuhan Duta Genre tiap kecamatan di Kabupaten Kediri dan *launching* Geprak (Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak). Duta Genre sebagai representasi dari generasi muda diharapkan dapat memberikan edukasi kepada sesama agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Hal ini menunjukkan peran representatif

DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam pencegahan perkawinan anak telah terlihat. Namun, komunikasi yang dibangun oleh DP2KBP3A sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan relasi dengan pihak eksternal belum menunjukkan pelaksanaan yang baik. Kurangnya komunikasi ini dapat berdampak pada miskomunikasi dan miskoordinasi dalam pelaksanaan berbagai program sebagai upaya pencegahan perkawinan anak.

Berbagai upaya nyata telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri dan para *stakeholders* lainnya dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Langkah-langkah yang diambil belum juga mampu mengatasi permasalahan yang kompleks ini.

Jumlah Pengajuan Diska di Kabupaten Kediri

Tahun	Jumlah
2022	569
2023	429

Sumber data: jawapos.com

Berdasarkan data DP2KBP3A Kabupaten Kediri yang diperoleh dari laman *Jawa Pos*, terdapat ratusan anak yang mengajukan dispensasi nikah dini. Bahkan, pada tahun 2022 terdapat 569 pemohon. Di tahun berikutnya, jumlah kasus relatif mengalami penurunan menjadi 429 pemohon. Namun, angka penurunan ini

masih menunjukkan jumlah kasus yang tinggi.

Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri, dr. Nurwulan Andadari, mengaku bahwa sebenarnya upaya pencegahan telah dilakukan sejak dahulu. Namun, pelaksanaannya belum maksimal sehingga belum bisa membuahkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih serius dari pemangku kebijakan terkait mengenai perannya dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran DP2KBP3A serta faktor pendukung dan penghambat peran DP2KBP3A dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Penelitian dianalisis menggunakan teori oleh Jam Ife dan Frank Tesoriero mengenai peran pemerintah karena peneliti ingin mengetahui tingkat peranan DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam menurunkan angka kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri dengan teknik penunjukan informan yang digunakan yaitu *purposive sampling*, di mana penetapan sampel dilaksanakan

dengan mempertimbangkan suatu kriteria tertentu. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknologi analisis kualitatif, dengan tahapan analisis berupa kondensasi data, penyajian data, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Metode penilaian data yang dipakai penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Beberapa metode yang digunakan dalam triangulasi sumber yaitu wawancara secara mendalam (*in-dept interview*) dengan informan, pengujian silang antara fakta dari informan dengan fakta di lapangan, serta pembuktian fakta dari informasi dengan pernyataan dari pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DP2KBP3A dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Kediri

Peran DP2KBP3A adalah tugas dan fungsi yang harus dilakukan sebagai instansi yang memiliki bagian penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

1. Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Anak

Pengoptimalisasian sumber daya anak merupakan upaya untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak hingga

dapat berdaya guna. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, optimalisasi sumber daya anak dapat berupa peningkatan kesadaran anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual mereka secara komprehensif serta peningkatan partisipasi anak dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.

DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah melakukan sosialisasi mengenai bahayanya perkawinan anak ke lingkungan sekolah maupun tempat tinggal anak. Selain itu, DP2KBP3A juga melakukan konseling kepada anak, baik di Cafe Sanak maupun di Kantor DP2KBP3A saat anak mengajukan diska. Pemberian konseling di Cafe Sanak dilakukan langsung oleh para penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang ada di masing-masing kecamatan. Hal yang menjadi penghambat adalah tidak semua penyuluh KB memiliki kompetensi layaknya psikolog profesional dalam pemberian konseling. Namun, berbagai pelatihan terus diberikan oleh pemerintah agar para penyuluh KB ini dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjadi konselor.

Upaya optimalisasi sumber daya anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak. Dalam hal ini, DP2KBP3A telah menginisiasi berbagai kegiatan dengan turut menggandeng Duta

Genre dan Forum Anak dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Harapannya, dengan adanya wadah atau organisasi yang mengajak anak-anak untuk bergerak produktif, mereka akan lebih banyak bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya juga mengembangkan potensi yang dimilikinya.

2. Penciptaan Lingkungan yang Mendukung

Lingkungan yang mendukung, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun suatu instansi, mempunyai peran yang besar dalam membentuk pola pikir, perilaku, dan keputusan individu. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, lingkungan yang mendukung dapat dicapai dengan perubahan nilai, norma, dan cara pandang masyarakat terhadap perkawinan anak; serta penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

DP2KBP3A telah memiliki beberapa program yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang ideal bagi anak, seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). DP2KBP3A juga melakukan sosialisasi melalui media, seperti radio dan koran, maupun lembaga-lembaga lainnya.

Penguatan peran orang tua dilakukan dengan pemberian konseling dan edukasi mengenai *parenting* kepada orang tua anak secara langsung. DP2KBP3A juga

berencana menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial dalam pemberian *punishment* kepada keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang melangsungkan perkawinan di usia anak. Dengan demikian, maka diharapkan orang tua dan keluarga juga turut membangun lingkungan yang mendukung sehingga dapat mencegah perkawinan anak terjadi.

3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan

Ketersediaan akses dan layanan dalam upaya pencegahan perkawinan anak bisa diwujudkan dengan peningkatan akses terhadap informasi dan dukungan yang didapatkan anak.

Informasi mengenai layanan yang diberikan oleh DP2KBP3A dipublikasikan melalui *website* resmi mereka, yaitu <https://dp2kbp3a.kedirikab.go.id/>.

DP2KBP3A Kabupaten Kediri menyediakan layanan permohonan diska. Layanan diberikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Surat Edaran (SE) Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor KB.05_3/418.22/X/2023 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, informasi mengenai kelengkapan berkas administrasi yang dibutuhkan oleh pemohon diska hanya disebarluaskan melalui papan pengumuman informasi yang ada di Kantor DP2KBP3A Kabupaten

Kediri. Informasi mengenai hal tersebut belum dapat diakses di laman resmi dinas maupun media sosial lainnya.

DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga telah menyediakan berbagai layanan pendukung dalam upaya pencegahan perkawinan anak, yaitu layanan konseling dan psikologis. Anak-anak yang memiliki permasalahan dapat mendiskusikan masalah mereka dengan penyuluh yang ada di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Upaya yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kediri berfokus pada aksesibilitas dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak. Namun, pengawasan kondisi setelah terjadi perkawinan anak juga akan dilakukan ketika anak berada dalam kondisi hamil. Anak yang sedang mengandung terindikasi memiliki risiko bahaya kesehatan yang lebih tinggi, baik bagi ibu maupun anak.

DP2KBP3A juga berencana untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu anak-anak yang mengalami kasus perkawinan anak. Kerja sama ini dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan. DP2KBP3A pun memberikan saran kepada anak yang telah putus sekolah untuk melakukan kejar paket ijazah.

4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Pelaksanaan penguatan regulasi dan kelembagaan memiliki manfaat yang

signifikan karena dapat membuat upaya yang dilakukan berjalan dengan efektif. Strategi ini dapat dilakukan dengan penguatan komitmen para *stakeholder* yang terlibat, penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi, serta penegakan regulasi.

Telah dibentuk Tim Efektif Pencegahan Perkawinan Anak berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 390 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif Pencegahan Perkawinan Anak. Berbagai *stakeholder* lintas sektor ikut tergabung dalam Tim Efektif ini, mulai dari Pemerintah Kabupaten Kediri, DP2KBP3A sebagai koordinator utama, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), hingga beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang ada di Kabupaten Kediri, seperti Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan lain-lain. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, dibutuhkan komitmen yang serius dari masing-masing lembaga agar upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri dapat berjalan efektif. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk memperkuat komitmen masing-masing *stakeholder*

Perihal regulasi, DP2KBP3A Kabupaten Kediri belum memiliki regulasi

khusus yang dikeluarkan oleh instansinya mengenai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Selama ini, mereka masih berlandaskan pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun UU. DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengenai pencegahan perkawinan anak berpatokan utama pada SE Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor KB.05_3/418.22/X/2023 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Upaya Perlindungan Perempuan Anak.

Regulasi yang ada tentu tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan implementasi yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan ketegasan dalam penegakan regulasi yang telah dibuat. DP2KBP3A dalam hal ini rutin mengadakan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) mengenai kebijakan yang telah diluncurkan.

Salah satu pihak yang dituju dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri, yang disebutkan dalam SE Pemerintah Kabupaten, adalah pemerintah daerah dari tingkat desa/kelurahan. Oleh karena itu, DP2KBP3A juga mengajak pemerintah desa untuk ikut menegakkan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, masih ada pihak-pihak yang tidak memiliki visi yang sama dalam pencegahan perkawinan anak. Mereka justru membantu para pemohon yang ingin

mengajukan diska ke DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Penguatan koordinasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memastikan langkah-langkah yang diambil dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Strategi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kerja sama lintas sektor, penguatan sistem data dan informasi, serta pelaksanaan *monev*.

DP2KBP3A telah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan beberapa OPD yang ada di Kabupaten Kediri. Selain menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah, DP2KBP3A juga turut menggandeng lembaga masyarakat dan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Kediri.

Penguatan sistem data dan informasi juga dilakukan DP2KBP3A karena hal ini nantinya dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. DP2KBP3A selalu melakukan sinkronisasi data dengan lembaga lain dalam menghimpun angka kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Biasanya, mereka akan berkoordinasi dengan Pengadilan Agama yang datanya digunakan sebagai data dasar oleh pemerintah provinsi dalam menentukan arah dan kebijakan.

Upaya penguatan koordinasi juga dilakukan melalui FGD dan monev dengan pihak-pihak yang terlibat, utamanya yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Sekretaris Daerah. Akan tetapi, tidak semua pihak yang terlibat menunjukkan komitmennya yang serius dalam pencegahan perkawinan anak. Beberapa pihak yang terlibat kadang kurang memahami dengan betul manfaat dari adanya koordinasi yang dilakukan. Kegiatan evaluasi ini juga belum dilakukan secara rutin dan sistematis dalam program Cafe Sanak oleh petugas di kecamatan. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, meskipun tidak melaksanakan pelaporan dan pencatatan melalui aplikasi yang telah disediakan, pengurus Cafe Sanak tetap melakukan komunikasi dua arah dengan DP2KBP3A agar tetap terjalin koordinasi antara keduanya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran DP2KBP3A dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Kediri

Pelaksanaan peran DP2KBP3A dalam pencegahan perkawinan anak tentunya tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya, baik faktor pendukung maupun penghambat. Dalam hal ini, faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari bagaimana DP2KBP3A Kabupaten Kediri melaksanakan perannya, yang diklasifikasikan menjadi beberapa peran

utama, yaitu peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis.

1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif berkaitan dengan upaya DP2KBP3A dalam menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sehingga pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri dapat berjalan secara terstruktur.

a. Penyediaan Sumber Daya

DP2KBP3A menyediakan layanan konseling untuk anak bersama psikolog profesional dan mendirikan Cafe Sanak. Namun, dari tiga jenis layanan yang harusnya diberikan di Cafe Sanak, salah satu layanan yaitu pemberian ruang kreasi bagi anak belum terlaksana. DP2KBP3A juga membangun fasilitas pendukung lainnya, yakni Gedung Sapa, untuk memfasilitasi penciptaan lingkungan yang mendukung dalam pencegahan perkawinan anak.

b. Pemanfaatan Sumber Daya

DP2KBP3A melakukan studi banding dengan daerah lain. DP2KBP3A juga melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga lintas sektor yang disertai dengan pendampingan kepada *stakeholders* terkait. Namun, hal ini masih sering kali diikuti dengan komunikasi yang kurang baik antara DP2KBP3A dengan pihak terkait lainnya sehingga masih terjadi miskomunikasi antara keduanya.

Selain itu, DP2KBP3A juga mengadakan FGD serta evaluasi bersama para *stakeholder* terkait. Berbagai peran yang telah dilaksanakan oleh DP2KBP3A mengalami hambatan pada terbatasnya anggaran yang teralokasi untuk upaya pencegahan perkawinan anak. Alhasil, beberapa upaya dan program yang digagas pun masih belum bersifat berkelanjutan.

2. Peran Edukasional

Peran edukasional berhubungan dengan upaya DP2KBP3A dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

a. Penyampaian Informasi dan Pengetahuan

Edukasi dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, baik di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal anak. Pemberian edukasi juga dilakukan melalui penyebaran informasi melalui *website* resmi DP2KBP3A Kabupaten Kediri dan juga pemasangan informasi di papan pengumuman Kantor DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Akan tetapi, pemanfaatan laman resmi ini belum dilaksanakan dengan maksimal karena masih ada beberapa informasi yang belum dapat diakses secara daring.

b. Pemberian Pemahaman

DP2KBP3A telah mengadakan pertemuan rutin dengan berbagai *stakeholder* guna penguatan regulasi dan

kelembagaan, serta pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui media sosial. Sementara itu, pemberian edukasi guna penguatan koordinasi pemangku kepentingan dilakukan dengan pelaksanaan FGD dengan berbagai lembaga lintas sektor.

c. Tindakan Advokasi

Dalam penciptaan lingkungan yang mendukung, edukasi diberikan oleh DP2KBP3A kepada masyarakat melalui sosialisasi secara langsung serta lewat media massa dan media sosial. Edukasi ini ditujukan agar masyarakat mau terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Namun sayangnya, edukasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan pengelolaan media sosial yang baik.

3. Peran Representatif

Peran representatif dalam hal ini berkaitan dengan interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A dengan *stakeholders* lain dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

a. Pembangunan Kerja Sama dan Kemitraan

Sebagai pihak representasi dalam pencegahan perkawinan anak, DP2KBP3A mengajak anak-anak untuk turut aktif dalam pencegahan perkawinan anak dengan menggandeng Duta Genre dan Forum Anak. Namun, pelaksanaan kerja sama ini tidak disertai dengan pemberian pelatihan khusus bagi anak yang terlibat.

Representatif dalam pencegahan perkawinan anak juga dilakukan dengan pembangunan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* lintas sektor, seperti Kader PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kediri, Nasyiatul Aisyiah, serta GIAT (Gerakan Indonesia Anti Perkawinan Anak). DP2KBP3A pun telah merencanakan berbagai kerja sama dengan beberapa OPD yang ada di Kabupaten Kediri demi peningkatan layanan yang diberikan. Representatif dalam penguatan regulasi dan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan kerja sama lintas sektor demi penegakan regulasi secara menyeluruh. Sementara itu, representatif dalam penguatan koordinasi dan pemangku kepentingan dilakukan dengan pengadaaan pertemuan diskusi dan tukar pendapat dengan *stakeholders* yang terlibat.

4. Peran Teknis

Peran teknis yaitu kemampuan DP2KBP3A dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

a. Kemampuan Profesionalitas Pegawai

Peran teknis oleh DP2KBP3A ditunjukkan melalui kecakapan para pegawai dalam pembuatan materi edukasi dan sosialisasi serta pemberian konseling kepada anak oleh profesional. Namun, peran ini menemukan hambatan karena tenaga psikolog profesional yang dimiliki

DP2KBP3A masih sangat terbatas sehingga pemberian konseling masih belum dapat terlaksana dengan efisien. Dalam penciptaan lingkungan yang mendukung, peran teknis dilakukan dengan pemberian konseling kepada orang tua anak serta pemanfaatan media sosial. Namun, hal ini tidak dibarengi dengan kemampuan pegawai dalam pengelolaan konten media sosial yang baik.

Peran teknis juga ditunjukkan dengan pemberian layanan pengajuan surat rekomendasi diska yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku. Namun, aksesibilitas layanan masih terhambat karena kurang cakupannya pegawai dalam memanfaatkan digitalisasi di era sekarang ini. Peran teknis DP2KBP3A juga dapat dilihat dari kecakapan pegawai dalam proses penghimpunan serta analisis data dan informasi yang didapatkan saat pertemuan dengan *stakeholders* lain.

PENUTUP

Kesimpulan

1. DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah menjalankan perannya dalam pencegahan perkawinan anak. Peran DP2KBP3A terdiri dari peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis. Dalam menjalankan perannya, DP2KBP3A Kabupaten Kediri melakukan berbagai strategi: (a)

optimalisasi sumber daya anak: telah dilakukan melalui sosialisasi, pemberian konseling kepada anak, menggandeng Duta Genre, serta membentuk Forum Anak. Namun, dalam pemberian konseling di Cafe Sanak/Balai Penyuluhan, ditemukan hambatan berupa kurangnya kompetensi sebagai psikolog profesional yang dimiliki oleh petugas penyuluh; (b) penciptaan lingkungan yang mendukung: telah diwujudkan dengan berkolaborasi dalam program Sekolah Ramah Anak dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), sosialisasi di berbagai media dan menggandeng *stakeholders* lintas sektor, serta pemberian konseling dan edukasi *parenting* kepada orang tua anak. DP2KBP3A juga merencanakan kerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan sanksi kepada keluarga PKH yang melakukan perkawinan anak; (c) aksesibilitas dan perluasan layanan: telah dilaksanakan dengan pemberian informasi mengenai layanan DP2KBP3A melalui laman <https://dp2kbp3a.kedirikab.go.id/> dan papan pengumuman informasi di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Kediri, pelayanan pemberian diska sesuai dengan prosedur, pengadaan layanan konseling, serta berbagai pelayanan pasca perkawinan anak. Namun, masih

terdapat keterbatasan akses informasi mengenai berkas persyaratan permohonan diska yang belum dapat diakses secara daring karena hanya tertera di papan pengumuman; (d) penguatan regulasi dan kelembagaan: telah dilakukan dengan membangun kelembagaan dengan berbagai *stakeholder* lintas sektor, menyelenggarakan FGD, penerapan dan penegakan regulasi yang berlaku, serta pelaksanaan monev.. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan hambatan berupa masih adanya beberapa pihak yang kurang menunjukkan komitmen serius dalam upaya pencegahan perkawinan anak; serta (5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan: telah dilaksanakan melalui peningkatan kerja sama dengan *stakeholders* lintas sektor. Koordinasi antar-*stakeholders* ini dilakukan dengan pengadaan pertemuan, FGD, serta monev. Namun sayangnya, berbagai kegiatan koordinasi tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan konsisten.

2. Faktor pendukung peran DP2KBP3A adalah pelaksanaan program “Psikolog *Goes to School/Kecamatan*”; sosialisasi, edukasi, dan konseling bagi orang tua dan anak; studi banding ke daerah lain; pembangunan fasilitas Gedung Sapa; kerja sama dengan

berbagai *stakeholder* lintas sektor yang disertai dengan pendampingan, FGD, dan monev; pemanfaatan Instagram dan *website* resmi DP2KBP3A Kabupaten Kediri; serta pelayanan yang sesuai dengan regulasi dan prosedur. Sementara itu, faktor penghambat peran DP2KBP3A adalah belum terlaksananya penyediaan ruang kreasi anak di Cafe Sanak, tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak, pengelolaan media sosial dan *website* yang kurang maksimal, belum adanya pelatihan khusus bagi *stakeholders* yang terlibat, serta kuantitas SDM yang masih kurang.

Saran

1. Meningkatkan pelayanan di Cafe Sanak dengan menghadirkan ruang kreasi anak. Selain itu, informasi mengenai keberadaan Cafe Sanak di setiap kecamatan perlu untuk lebih disebarluaskan lagi.
2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.
3. Mengelola media sosial, terutama akun Instagram DP2KBP3A [@dp2kbp3a_kedirikab](https://www.instagram.com/dp2kbp3a_kedirikab) dengan lebih baik. Hal ini bisa dilakukan dengan pembuatan konten edukasi yang lebih bervariasi dan mengikuti tren yang sedang terjadi.

4. Memanfaatkan *website* DP2KBP3A <https://dp2kbp3a.kedirikab.go.id/> dengan lebih maksimal. Hal ini bisa dilakukan dengan pemublikasian semua informasi mengenai pelayanan yang diberikan secara menyeluruh serta konsistensi dalam publikasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan.
5. Mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi *stakeholders* yang terlibat, khususnya para Duta Genre dan petugas penyuluh di Cafe Sanak.
6. Menambah SDM psikolog profesional untuk pemberian konseling. DP2KBP3A juga dapat mempertimbangkan pelaksanaan kerja sama dengan organisasi atau relawan yang memiliki kompetensi mumpuni di ranah konseling.
7. Melakukan monev secara lebih rutin dan berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, F. Y., & Fauzi, A. M. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Pakuncen. *E-Journal Unesa*, 1–16.
- Anggraini, D. E., Nurcahyanto, H., & Rostyaningsih, D. (2024). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Park Desa Pasar Banggi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43736>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance

- dalam Perspektif Administrasi Publik. In *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Badan Pusat Statistik, & Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In *Unicef*.
- Cahyani, M. E., Sulandari, S., & Hariani, D. (2021). Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas. *Journal of Public Policy and Management Review*, *10*(3), 224–237.
- Dani, C. E. M. R., & Hertati, D. (2024). Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Uptd Kampung Anak Negeri Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *8*(1), 14–24. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6585>
- Herlyansyah, B. (2021). Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Penetapan Upah Minimum Kota (UMK). *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Hia, E. E. (2019). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, *11*(2), 35–51.
- Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. (2023). Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan untuk Mencegah Perkawinan Anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, *6*(2), 320–334. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>
- Jenuri, & Najib, A. (2023). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *3*(2), 127–142. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9).
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *04*(048).
- Makmur, F. P., Mone, A., & Yusuf, M. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Menangani Keluarga Miskin di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, *4*(6).
- Ni'amillah, H., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023). Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam Menangani Laporan Maladministrasi Pelayanan Publik. *Journal of Public Policy and Management Review*, *12*(4), 549–562. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.41363>
- Prastiyanto, V. I., Maesaroh, & Widowati, N. (2021). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Public Policy and Management Review*, *10*(2). <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/14461/1/1.COVER.pdf>
- Purnomo, A. I., Hanani, R., & Zarkasyi, A. (2024). Analisis Peran Kader dalam Program SAN-PIISAN di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *13*(2), 1–11.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *17*(33), 81–95.
- Riswanto, A., Dewi, L. K. C., Sepriano, Pardede, E., & Zafar, T. S. (2023). *Social Media Marketing: Analytics &*

- Mastering the Digital Landscape*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rumarey Wattimena, Z. K., Rustadi, R., & Suadi, S. (2022). Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan (Studi Pada Kampung Nelayan di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 51–80. <https://doi.org/10.22146/jkn.72773>
- Ton, W. L., Zakariya, & Santoso, T. (2020). Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu. *Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Wulandari, E. A., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i1.42283>
- Yayasan Kesehatan Perempuan. (2020). *Perkawinan Usia Anak*. Ykp.or.Id. <https://ykp.or.id/datainfo/materi/226>
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2023). UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153–166. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>
- Sumber Lainnya**
- Basalamah, Anwar Bahar. 2022. *Cegah Perkawinan Anak, DP2KBP3A Kabupaten Kediri Dirikan Cafe SANAK*. <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/781296543/cegah-perkawinan-anak-dp2kbp3a-kabupaten-kediri-dirikan-cafe-sanak>
- Budianto, Yosep. (2024). *Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
- DP2KBP3A Kabupaten Kediri. (2023). *Bahaya Pernikahan Dini*. https://www.instagram.com/dp2kbp3a_kedirikab/p/Cwock_MpD-j/?img_index=1
- Dtail Production. (2022). *Yakin Udah Siap Nikah | Iklan Layanan Masyarakat | BKKBN X DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI*. <https://www.youtube.com/watch?v=-bUah6fMnZfY>
- Illahi, Nanda Pramudya F. (2024). *Ratusan Anak di Kabupaten Kediri Ajukan Dispensasi Nikah Dini, PA Sebut Banyak yang Hamil Dulu*. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014330401/ratusan-anak-di-kabupaten-kediri-ajukan-dispensasi-nikah-dini-pa-sebut-banyak-yang-hamil-dulu>
- Kusnandar, Viva Budy. (2021). *10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi Pada 2020*. <https://databoks.katadata.co.id/data-published/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>
- Pemerintah Kabupaten Kediri. (2023). *Atasi Pernikahan Usia Muda, Bunda Cicha Lantik Duta Genre Kecamatan*. https://www.instagram.com/pemkab.kediri/p/Cya8P37pcuK/?img_index=1
- UNICEF Global Database. (2020). *Child Marriage*. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>